

# SISTEM BIROKRASI DAN KEKUASAAN MASYARAKAT SUKU SASAK

**Agus Dedi Putrawan**

*Pascasarjana Politik Islam*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Email: agus\_putrawan@gmail.com*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas sistem birokrasi dan kekuasaan suku sasak, di mana tuan guru hingga saat ini mempunyai peran penting dalam perubahan birokrasi dalam masyarakat sasak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa birokrasi dan kekuasaan masyarakat Sasak mengalami perkembangan. Semula birokrasi dan kekuasaan masyarakat sasak patrimonial terpengaruh terpengaruh oleh kekuasaan kerajaan Majapahit, di mana kaum bangsawan (raja) sebagai penguasa penuh. Berkuasanya kerajaan Karang Asem Bali merubah pola kekuasaan dan birokrasi berdasarkan kasta. Hingga kemudian datang kesultanan Makasar dan para mubaligh dari Jawa timur yang kemudian membebaskan dari kekuasaan dan birokrasi yang berdasarkan kasta. Di sinilah kemudian hingga kini kekuasaan mubaligh yang kemudian disebut tuan guru mempunyai peran penting dalam merubah sistem birokrasi dan kekuasaan suku sasak dari tradisional menjadi rasional.

**Kata Kunci:** Birokrasi dan Kekuasaan, Suku Sasak

## A. Pendahuluan

Fenomena perpolitikan tokoh agama di Indonesia saat ini terlebih tokoh Islam (Kiai, Tuan Guru, Ustadz) memang tidak lepas dari perjuangan para *Founding Fathers* dalam mendirikan Republik ini.<sup>1</sup> Mereka berperang “*Fi Sabilillah*” memperjuangkan kemerdekaan serta mengkonsolidasikan setelah kemerdekaan. Atas dasar itu, maka wajar timbul organisasi-organisasi masyarakat (ormas) maupun politik (parpol) yang berbasis Islam untuk mengakomodir umat/masyarakat. NU dan

---

<sup>1</sup>Terlihat dari perang-perang yang dilakoni tokoh-tokoh Islam seperti perang Padri di Sumatra Barat sekitar tahun 1803 - 1838, lihat. Cuisinier, Jeanne (1959). "La Guerre des Padri (1803-1838-1845)". Archives de Sociologie des Religions. Centre National de la Recherche Scientifique. Perang Diponegoro di Jawa sekitar tahun 1825-1830. Dan perang Aceh sekitar tahun 1873-1904.

Muhammadiyah adalah dua contoh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, belum lagi organisasi-oraganisasi Islam lainnya. Tokoh politik dari dua organisasi ini adalah Gus Dur<sup>2</sup> (alm) mewakili NU dengan partai PKB yakni mantan presiden ke empat, kemudian Amien Rais mewakili Muhammadiyah dengan partai PAN, beliau adalah mantan ketua MPR.

Di Lombok terdapat organisasi NW (Nahdlatul Wathan) yang didirikan oleh Tuan Guru<sup>3</sup> Zainudin Abdul Majid (alm) wafat 1997, anggota Kontituante masa Soekarno dan anggota MPR masa Soeharto. Beliau adalah kader partai Golkar yang sempat diajak masuk partai pohon beringin itu gara-gara perannya dalam perlawanan terhadap penjajahan dan komunisme di Lombok.<sup>4</sup> Dalam berpolitik, beliau cukup lihai membaca situasi dan kondisi (political opportunity), akomodatif dan menampung aspirasi kaum ‘*Grass Roots*’, terbukti ketika kekecewaan masyarakat memuncak terhadap kinerja pemerintah pusat yang otoriter terhadap masyarakat, TGH. Zainudin membebaskan pengikutnya untuk memilih partai dengan simbolisasi “ban bin dan bun”.<sup>5</sup>

Di pulau Lombok jika ditelisik lebih jauh, sekitar abad ke 17-18 M sebelum Indonesia ada, pulau Lombok diwarnai dinamika sejarah yang cukup dinamis. Lombok dikuasai lima kekuasaan secara berurutan. Kerajaan Majapahit sudah menduduki pulau Lombok sejak abad ke 13 hingga abad 15, melahirkan kerajaan-kerajaan lokal di antaranya kerajaan Selaparang dan Pejanggik. Kerajaan Gowa Makasar masuk ke pulau Lombok kira-kira abad ke 16 berlatar belakang perdagangan karena Lombok pada waktu itu sudah terkenal dengan lumbung padinya (gudang

---

<sup>2</sup> Biografi singkatnya dapat dilihat dalam tulisan. Rida’i, Gus Dur: KH. Abdurrahman Wahid, Biografi Singkat 1940-2009, (Yogyakarta: Garasi House of Book, 2013), hlm. 1-185. Greg Barton, Biografi Gus Dur, (Yogyakarta: LKiS, 2002). Lebih lanjut tentang ijtihad politik Gus Dur dalam analisis wacana kritis, lihat tulisan Munawar Ahmad, Ijtihad Politik Gus Dur “Analisis Wacana Kritis”, (Yogyakarta: LKiS, 2010).

<sup>3</sup>Tuan guru adalah seorang yang pernah haji, pemimpin agama, pengajar di pesantren pada umumnya, mempunyai banyak pengikut (pengajian), serta memiliki karisma di tengah-tengah masyarakat. Dipandang sebagai tokoh tradisional dan ditopang oleh kualitas dirinya sebagai ilmuwan dalam ilmu agama Islam. Julukan Tuan Guru dimulai kira-kira pada tahun 1740-1935. Lihat. Jamaludin, Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935, (Jakarta: Litbang Kementerian Agama RI, 2011), hlm.134.

<sup>4</sup>Dahulu ia adalah kader Masyumi karena sesuatu dan lain hal ia kemudian beralih ke Partai Golongan Karya (Golkar). Lihat tulisan Jhon M. MacDougall, *Kriminalitas dan Ekonomi Politik Keamanan di Lombok*. dalam Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, Politik Lokal di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 376.

<sup>5</sup>Dengan mengeluarkan instruksi: ban, bin, bun yang artinya, “ban” untuk partai banteng yakni PDI, “bin” untuk bintang PBB dan “bun” untuk *bunut* (Sasak: pohon beringin) untuk Golkar

beras). Namun Gowa Makasar terlebih dahulu menjalin hubungan kekeluargaan dengan kerajaan Bima di pulau Sumbawa.

Ekspansi kerajaan Karang Asem Bali atas kerajaan-kerajaan yang ada di Lombok membuat akulturasi budaya Hindu Bali mempengaruhi dan mendominasi corak budaya masyarakat Sasak pada saat itu hingga sekarang<sup>6</sup>, namun budaya Islam sebenarnya telah lebih dahulu masuk ke pulau Lombok<sup>7</sup> sebelum Bali mengalahkan kerajaan-kerajaan Lombok sehingga terjadi gesekan antara budaya Hindu Bali dengan Islam yang datang dari Makasar dan pulau Jawa. Datangnya penjajah baik Belanda maupun Jepang memposisikan kaum bangsawan (*menak, priayi*) dalam posisi politik yang strategis, sedangkan Tuan Guru yang merefleksikan masyarakat Islam menjadi tokoh agama yang hanya berkiprah dalam bidang dakwah semata, namun lambat laun dalam perkembangannya peran para Tuan Guru semakin sentral dengan mengalihkan dakwah mereka dari pendidikan keagamaan di masjid maupun pesantren kepada denyut-denyut pemberontakan sebagai bentuk perlawanan atas penjajahan.

Pada tahun 1998-2000 maupun tahun-tahun selanjutnya, para tuan guru memainkan peran krusial di tengah-tengah masyarakat sasak, misalnya ketika transisi orde baru menuju orde reformasi, terjadi konflik-konflik bersenjata, pencurian, namun dengan sigap sebagian tuan guru menggagas sebuah organisasi pamswakarsa untuk meredam situasi. Ketika terjadi konflik nasional (konflik Muslim Kristen di Poso) di *blow up* oleh media kemudian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ditumpahkan ke pulau Lombok, terjadi pembakaran gereja, penjarahan tempat-tempat usaha, perusakan rumah-rumah, dan lain sebagainya, sebagian Tuan Guru menjadi mediator guna meredakan konflik tersebut.

---

<sup>6</sup>Masih hidup budaya-budaya yang mirip dengan kebudayaan Bali seperti budaya seni gambelan, adat pernikahan, *ogoh-ogoh*, *melasti*, kikir gigi, seni tari dan lain-lain. Ekspansi itu terjadi sekitar tahun 1740 M. Lihat, Ide Anak Agung Gede Agung, Bali pada Abad XVIII, (Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press, 1989), hlm. 103.

<sup>7</sup>Masuknya Islam ke pulau Lombok diawali dari masuknya pedagang-pedagang nusantara yang beragama Islam kemungkinan abad ke-15, yang sebelumnya pada abad ke 13-14 Lombok di bawah kekuasaan Majapahit. Islam juga dibawa oleh orang-orang Makasar dan orang-orang Jawa Timur (Sunan Prapen) pada abad ke 16-17, melalui Lombok (khusus Sunan Prapen), beliau melanjutkan dakwahnya ke pulau Sumbawa yang sebelumnya Islam sudah masuk terlebih dahulu melalui dakwah para mubaligh Makasar pada tahun 1540-1550 M. lebih lanjut lihat, Nugroho Notosusanto, et al, *Sejarah Nasional Indonesia: "Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia"* Cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 72. lihat juga, Thomas W. Arnold, *Sejarah Dakwah Islam terj.* Nawawi Rambe, (Jakarta: Penerbit Wijaya, 1981), hlm. 346-347.

Di era kontemporer saat ini, peran para Tuan Guru semakin central, suku *Sasak* belajar ilmu agama, mengikuti pengajian, mengadu persoalan kemasyarakatan, memecahkan permasalahan sosial dan sebagainya.<sup>8</sup> Tuan Guru menjadi sosok multifungsi dalam masyarakat dengan karisma yang melekat pada dirinya sehingga selain mengetuai pondok pesantren yang para santrinya berasal dari pelosok-pelosok desa dan kota. Banyak dari murid-muridnya menjadi Tuan Guru-Tuan Guru baru di kampungnya. Para Tuan Guru mempunyai banyak pengikut yang militan karena sering melakukan pengajian-pengajian di kampung-kampung, kadang-kadang sekali sebulan, sekali seminggu, bahkan setiap hari.<sup>9</sup> Masyarakat *Sasak* mempunyai cara pandang yang khusus dalam memperlakukan atau berhadapan dengan sosok Tuan Guru, ini tak lepas dari sikap dan pemahaman masyarakat *Sasak* tentang Tuan Guru: penghormatan, cara sikap, serta mengundang Tuan Guru dalam acara-acara hajatan.<sup>10</sup>

Masa reformasi membuka *keran* demokrasi seluas-luasnya yang ditandai dengan desentralisasi dan kebebasan berpolitik di setiap daerah. Daerah diberikan otoritas mengelola sumberdaya alam, memberdayakan sumberdaya manusianya. Masa orde baru Soeharto yang cenderung sentralistik berakhir dengan tumbangnya rezim tersebut akibat reformasi yang digulirkan oleh rakyat Indonesia pada tahun 1998. Rakyat Indonesia yang telah sekian lama merindu-rindukan kebebasan berfikir, berpendapat dan berorganisasi, kini meraih mimpi meski banyak korban berjatuh. Kebebasan berpolitik dengan massa yang banyak membuat para Tuan Guru tergiur untuk terjun dalam ranah politik.<sup>11</sup> Terlatar belakangi dengan bobroknya ahlak birokrasi yang membuat rakyat miris,<sup>12</sup> sehingga para Tuan Guru merasa terdorong meningkatkan volume dakwahnya yakni

---

<sup>8</sup>Ketika terjadi krisis, kejahatan pencurian sering terjadi di pulau Lombok sehingga beberapa Tuan Guru membentuk organisasi pamswakarsa (anti kejahatan) untuk membasmi para maling seperti: Ampibhi, Ababil, Buru Jejak (bujak) dan lain-lain. Lihat tulisan MacDougall, *Kriminalitas dan Ekonomi Politik Keamanan di Lombok*, hlm. 375. Lihat juga, Kari Telle, *Vigilante Citizenship: Sovereign Practices and the Politics of Insult in Indonesia*, (Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI), 2013), hlm. 183-212.

<sup>9</sup>Jamaludin, Tuan Guru dan Dinamika Politik Kharisma dalam *Dialektika Teks Suci Agama: Strukturasi Makna Agama dalam Kehidupan Masyarakat*, Irawan Abdullah, et al. (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 138.

<sup>10</sup>Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935*. hlm. 10.

<sup>11</sup>L. M. Ariadi, Haji Sasak “*Sebuah Potret Dialektika Haji dan Kebudayaan Lokal*”, (Ciputat: Impresa, 2013), hlm. 7.

<sup>12</sup>Hampir setiap hari pemberitaan nasional tentang kasus korupsi para pejabat menjadi menu utama perwartaan. atas dasar inilah mungkin para tuan guru merasa harus turun tangan dalam memperbaiki kebobrokan tersebut.

dalam bidang politik secara aktif, dengan harapan akan lebih gampang monolong umat.<sup>13</sup> Dalam politik tuan guru menolong/berdakwah dengan duduk di pemerintahan, membuat kebijakan, memberikan efek lebih massif daripada hanya berhotbah di masjid. Para tuan guru keluar sarang, mulai berani berkampanye, memperkenalkan visi dan misi mereka kepada masyarakat, membuat dan menyebarkan pamphlet, baliho serta membuat iklan kampanye baik melalui radio dan televisi maupun media cetak seperti koran dan majalah dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

## A. Birokrasi dan Kekuasaan

### 1. Hakikat Kekuasaan

Kekuasaan secara umum berarti kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik (Mengurus, memimpin, memerintah). Kekuasaan berasal dari kata “kuasa” yang diberi awalan *ke* dan akhiran *an*. Kuasa berarti kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu) kekuatan serta wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sbgainya).<sup>14</sup> Menurut R. A. Dahl dan George Kousoulas, sebagaimana dikutip oleh Abdul Muin Salim:

*“Power is a special case of the exercise of influence; it is the process of affecting policies of others with the help of (actual threatened) severe deprivations for noncompormity with policies intended..... ini berarti pengaruh yang efektif tanpa diiringi ancaman (hukuman) tidak dapat dikategorikan sebagai kekuasaan”<sup>15</sup>*

Pendapat berbeda diutarakan George Kousoulas.

---

<sup>13</sup>Jika seseorang menyisihkan gajinya satu bulan, maka kemungkinan dia hanya mampu menyumbang kepada satu orang anak yatim. Jika ia mengumpulkan sejumlah pendapatan keluarga, maka kemungkinan ia akan mampu membantu lima sampai sepuluh anak yatim. Kemudian seandainya ia membangun sebuah yayasan sosial, maka ia mungkin akan mampu menolong lima puluh sampai seratus anak yatim, namun bayangkan jika dia duduk di pemerintahan, membuat kebijakan, maka bayangkan berapa banyak anak yatim yang akan dibantunya. Semangat inilah yang membuat para tokoh agama dalam hal ini Tuan Guru meningkatkan *volume* perjuangannya (*Fastabiqul Khoirat*) dalam politik praktis.

<sup>14</sup> Kamus KBBI Offline.

<sup>15</sup>Dahl dan Abraham Kaplan sepakat dengan mengutip pendapat Harold D. Lasswel. Lihat. Abd Muin Salim, Fiqh Siyasa “Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 56

*“Esensi kekuasaan dengan pendekatan pragmatik (pragmatic approach) adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang dapat menjadikan orang lain melaksanakan sesuatu yang biasanya ia tidak akan melakukannya dengan kebendanya sendiri. Kemampuan yang dimaksud ini dapat bersumber dari kekuatan, kekayaan, kedudukan, kualitas pribadi, organisasi, dan Ideologi”<sup>16</sup>*

Gambaran yang paling umum digunakan untuk mengetahui hakikat kekuasaan adalah gambaran yang dikemukakan oleh Max Weber tentang tiga tipe kekuasaan murni; karismatik (tuan guru), tradisional (raja, bangsawan) dan legal-rasional (birokrat). Pendapatnya dianggap relevan karena dikaitkan dengan bentuk, aksi dan hubungan sosial yang melekat pada setiap masyarakat. Namun yang perlu perjas dalam pembahasan ini sebagaimana April Carter dalam tulisannya “otoritas dan demokrasi” menekankan terminologi Weber yang biasa secara suka rela bukan melalui paksaan. Menurut Weber bahwa faktor yang paling penting untuk *Herrschaft* adalah sebuah legitimasi. dikenal dengan sebutan *Herrschaft*, Talcott Parson menerjemahkannya dengan “kekuasaan”, Reinhard Bendix dan Raymon Aron menafsirkan “dominasi yang sah”.<sup>17</sup> April Carter mengatakan, sebenarnya Weber ketika menyebut *Herrschaft*, ia ingin mengacu pada kemampuan seseorang pemimpin untuk mendapatkan loyalitas dari kelompoknya, atau ketundukan. Weber tidak sedang mengajukan deskripsi tentang kekuasaan akan tetapi sebuah abstraksi dari relitas konkrit.

*“Hubungan karisma pada dasarnya merupakan fenomena yang tidak umum dan kadangkala mempengaruhi pola-pola sosial yang sudah mapan, maka dua jenis utama yang bersifat abash adalah jenis kekuasaan yang bersifat tradisional dan rasional-legal. Kekuasaan tradisional menurut Weber adalah orde sosial yang standar pada kebiasaan-kebiasaan kuno dengan mana status dan hak-hak para pemimpin juga sangat ditentukan oleh adat kebiasaan. kekuasaan tradisional juga memerlukan adanya unsur-unsur kesetiaan pribadi yang menghubungkan hamba dengan tuannya dan drajad kesewenangan pribadi dalam mana para penguasa memberikan perintah dan persetujuannya..... dalam tipe legal-rasional semua peraturan ditulis dengan jelas dan diundangkan dengan tegas sedang batas-batas*

---

<sup>16</sup>Ia menggabungkan antara pendekatan sosiologis dan institutional. Ibid.

<sup>17</sup>April Carter, Otoritas dan Demokrasi, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm.54

*wenangan para pejabat ditentukan oleh aturan main dan kepatuhan serta kesetiaan tidak ditunjukkan kepada pribadi para pejabat melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal.”<sup>18</sup>*

## 2. Sumber Kekuasaan

Kekuasaan didapatkan melalui koersi (paksaan) dan persuasi (kesukarelaan pengikut) atau dominasi.<sup>19</sup>

*“Ada dua cara menjadi penguasa, seseorang menjadi penguasa karena cara-cara keji atau bila orang biasa menjadi penguasa karena kemurahan hati warga”<sup>20</sup>, “Kekuatan itu dapat didapatkan melalui kekerasan, moral, material maupun kecakapan.” kata Niccolo Machiavelli.<sup>21</sup> “Setiap negara dibangun di atas kekuatan” kata Trotsky di Litovsk.<sup>22</sup>*

*“By power is meant that opportunity existing within a social relationship which permits one to carry out one’s own will even against resistance and regardless of the basis on which this opportunity rests. By domination is meant the opportunity to have a command of a given specified content obeyed by a given group of persons. by ‘discipline’ will be meant the opportunity to obtain prompt, and automatic obedience in a predictable form from a given group of persons because of their practiced orientation toward a command..”<sup>23</sup>*

---

<sup>18</sup>Ibid, hlm. 55, 56.

<sup>19</sup>Lebih lanjut, dalam pembahasan tentang kekuasaan. Ibid, hlm. 53-83.

<sup>20</sup>Niccolo Machiavelli, *the Prince “Sang Penguasa”* terj. Natalia Trijaji, (Surabaya: Selasar Surabaya, 2009), hlm. 73.

<sup>21</sup>Machiavelli, *the Prince*, terj. Luigi Ricci, *Introduction. Christian Gause*, (New York: New American Library, 1980), hlm. 48-49.

<sup>22</sup>“Negara adalah sebuah relasi di mana manusia mendominasi manusia, sebuah relasi yang ditopang oleh sarana kekerasan yang *legitimate* (atau yang dipandang sebagai *legitimate*). jika ingin agar Negara eksis, maka mereka yang didominasi harus mematuhi otoritas yang diklaim ada pada kekuasaan. Kapan dan mengapa orang patuh?. Atas justifikasi batiniah apa dan di atas sarana eksternal apa dominasi itu bertumpu?”.lihat. Max Weber, *Sosiologi, judul asli: From Max Weber; Essays in Sociology*” terj. Noorkholish, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 92-93.

<sup>23</sup>Joseph and Harris, *Social Theory “Conflict, Cohesion and Consent”*, (Edinburgh University Press Ltd, 2003), hlm. 99.

Adapun sumber kekuasaan menurut Wirawan Sarwandi dibagi menjadi tiga macam, (kedudukan, kepribadian, politik),<sup>24</sup> berbeda dengan Max Weber. Menurut Weber, sebenarnya ada tiga justifikasi batiniah, yang menjadi legitimasi dasar bagi dominasi warga, rakyat atau pengikut; *Pertama*, adanya otoritas masa lalu yang abadi,<sup>25</sup> *Kedua*, otoritas “*gift grace*” personal dan luar biasa,<sup>26</sup> *Ketiga*, dominasi karena “legalitas”.<sup>27</sup>

### 3. Jenis-Jenis Kepemimpinan sebagai Pembentuk Birokrasi

Jenis kepemimpinan yang diajukan di sini adalah jenis-jenis kepemimpinan yang di kemukakan oleh Weber yaitu; pemimpin karismatik, pemimpin tradisional dan pemimpin legal. *Pertama*, Kepemimpinan karismatik ialah jenis kepemimpinan yang dianggap oleh pengikutnya seolah-olah diberikan tugas khusus karena ia memiliki dan diberkati bakat yang khusus oleh Tuhan untuk memimpin orang banyak yang sedang mengalami krisis kepemimpinan. Dalam hal ini peneliti mengambil contoh; Sukarno sebagai pemimpin bangsa, presiden Indonesia, Mahatma Gandhi

---

<sup>24</sup> Adapun sumber-sumber tersebut antara lain. *Pertama*, Kekuasaan yang bersumber pada kedudukan terbagi menjadi beberapa jenis: Kekuasaan formal atau legal. Kendali atas sumber dan ganjaran, kendali atas hukum, Kendali atas informasi, kendali ekologis (lingkungan atau perekayasa situasi “*situation engineering*”), *Kedua*, Kekuasaan yang bersumber pada kepribadian: keahlian atau keterampilan, Persahabatan atau kesetiaan, karisma. *Ketiga*, Kekuasaan yang bersumber dari politik. Kendali atas proses pembuatan keputusan, koalisi, partisipasi, institusionalisasi (French & Raven, 1959), (Pettigrew, 1972), (Pfeffer, 1981), (Pfeffer & Salanick, 1974), (Stevenson, Pierce & Porter, 1985), (Oldham, 1975), (House, 1977), Sarlito Wirawan Sarwon, Psikologi Sosial Kelompok dan Terapan (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm.40-45. Dalam penelitian peneliti ini lebih menekankan pada apa yang dikatakan Max Weber, namun sebagai referensi perbandingan, maka peneliti tambahkan definisi-definisi terkait sumber kekuasaan seperti di atas.

<sup>25</sup>Yakni otoritas yang berdasarkan atas adat istiadat yang dikeramatkan melalui pengakuan yang tak terbayangkan tuanya dan orientasi kebiasaan untuk menyesuaikan. inilah yang disebut dominasi “tradisional” yang mempraktikkan *patriarch* dan penguasa patrimonial pada zaman dahulu. *Ibid*.

<sup>26</sup>Ketaatan personal absolute dan keyakinan personal pada wahyu, heroisme, atau kualitas lain dari kepemimpinan individual. Inilah yang disebut dominasi “karismatik”, sebagaimana dipraktikkan nabi atau bidang politik oleh panglima perang terpilih, panglima plebisitarian, para Demagog besar, atau pemimpin partai politik. *Ibid*.

<sup>27</sup>Karena keyakinan pada keabsahan statuta legal dan “kompetensi” fungsional yang didasarkan pada pranata yang diciptakan secara rasional. dalam hal ini, kepatuhan diperlukan guna melaksanakan berbagai kewajiban berdasarkan hukum. Inilah dominasi sebagaimana dijalankan “abdi negara” modern dan semua pemegang kekuasaan yang dalam hal ini menyerupai abdi negara. *Ibid*.



sebagai pemimpin karismatik di India, Tuan Guru generasi awal di Lombok. *Kedua*, pemimpin tradisional ialah pemimpin yang mendapat kedudukan berdasarkan warisan dari leluhur. Dengan alasan mempertahankan tradisi turun-temurun, pengangkatannya pun dianggap biasa oleh penduduk (masyarakat). *Ketiga*, kepemimpinan legal ialah kedudukan yang diberikan oleh rakyat berdasarkan aturan-aturan hukum yang disepakati. kekuasaannya pun terbatas oleh tata hukum berupa undang-undang tertulis, seperti halnya di Indonesia terdapat UUD 1945.<sup>28</sup>

Dari jenis-jenis kepemimpinan di atas, dalam perjalanannya selalu melahirkan gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, entah otoriter (otokrasi), demokratik maupun gaya *paternalistic*. Gaya kepemimpinan otoriter artinya seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan paksaan, sentralistik dan cenderung menghukum orang yang menentang kehendaknya. Gaya kepemimpinan demokratik ialah seorang pemimpin yang selalu mempertimbangkan pendapat dan saran orang banyak dalam mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan paternalistik biasa dikenal dengan gaya kebapaan, dalam kepemimpinannya ia menganggap bawahannya sebagai anak yang belum dewasa. Ia mengatur apa yang terbaik bagi anaknya (pengikut), dan biasa ditemukan gaya kepemimpinan ini pada wilayah feodal atau bekas wilayah feodal.<sup>29</sup>

## **B. Sistem Birokrasi dan Kekuasaan Masyarakat Suku Sasak**

Sejarah tentang Lombok dan kerajaan-kerajaan kecil di pulau itu tidak begitu jelas dalam pembahasan, karena sulitnya data dan jejak-jejak sejarah yang mendukung sebuah penelitian dilakukan. Sejarah tentang Lombok sendiri sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh *Insider* selalu bertitik pada membahas tentang masuknya pengaruh Islam dan perkembangannya, di samping itu terdapat juga para peneliti *outsider* di antaranya; Albert Polak (1978), Svan Cederroth (1981) penelitian antropologis mengenai Lombok dari masa-masa terakhir, lalu Arbert Leemann (1989) yang meneliti masalah kepercayaan orang Sasak (boda, wetu telu, wetu lima) dan perubahan sosial ekonomi masa kini, serta Van

---

<sup>28</sup> Riberu, Dasar-Dasar Kepemimpinan, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 3-5.

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 7-8.

Der Kraan yang meneliti masalah perlawanan penguasa Lombok yang diwarnai oleh perkembangan Islam terhadap penguasa Bali pada masa kolonial di Lombok.<sup>30</sup>

Menurut Babad Lombok, kata Lombok berasal dari nama seorang raja yang pernah menguasai Pulau Lombok. Ada juga yang menyangsikan bahwa kata Lombok itu sebenarnya diambil dari kata *Lomboq* yang berarti lurus (Lombouk). Menurut Lalu Bayu Winda, Pembahasan nama Lombok maupun Sasak tidak begitu jelas, selalu berdasarkan asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat.<sup>31</sup> Lombok disebut dalam kekawin “*Negara*

---

<sup>30</sup>Sven Cederroth, *Return of the Birds. Images of a Remarkable Mosque in Lombok*, Report Information from ProQuest, 30 April 2015 10:52, yang menceritakan tentang simbol Islam watu telu seakan kembali lagi, A. Polak, *Traité En Tweespalt In Een Sasake Boerengemeenschap, Lombok-In-Donesie* (Amsterdam: Koninklijk Instituut Voor De Troepen, 1978). S Cederroth, *the Spel of the Ancestors and the Power of Mekkah. A sasak community on Lombok*, (Gothenburg: Studies in Social Anthropology, vol. 3. 1981), Keduanya melihat aspek pertentangan penduduk, dan interaksi antara kekuatan adat dan pengaruh Islam pada kehidupan orang Sasak di Lombok Barat. A. Leemann, *Internal and external factors of socio-cultural and socio-economic dynamics in Lombok “Nusa Tenggara Barat”*, (Zurich: Geographisches Institut Abt. Antropogeographie Universitat Zurich, 1989), A.van Der Kraan, *Lombok, Conquest, Colonization, and Underdevelopment, 1870-1940* (Singapore: HES, 2980). Sebagaimana dikutip oleh Pamarimatha, Perdagangan dan politik di Nusa Tenggara. hlm. 9.-10.

<sup>31</sup> Lihat Lalu Bayu Winda, *Manusia Sasak “Bagaimana Menggaungnya”*, (Yogyakarta: Genta Press, 2011), hlm. 17. Tidak banyak yang dapat diketahui sejarah Lombok sebelum abad ke 12”. Teks-teks Barat dari dari abad 17 sampai dengan abad ke 19 menyajikan suatu gambaran yang sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam babad Lombok dan babad Selaparang, lihat. Hans Hägerdal, *War and culture: Balinese and Sasak Views on Warfare in Traditional Historiography*, (IP Publishing Ltd & <http://www.jstor.org>, 2004), hlm. 91-93. Menurut Lalu Lukman, makna Sasak disepadankan dengan “yang satu” atau “Esa” sedangkan Lombok dengan konsep istiqamah dalam Islam. Lalu Lukman, *Lombok*, (Mataram: Pokja, 2004), hlm. 1. lihat juga pendapat, Lalu M. Azhar, nama Sasak dan Lombok secara makna dan filosofis adalah Sasak artinya bambu-bambu yang dijadikan satu kemudian disatukan menjadi rakit yang kokoh, sedangkan Lombok artinya lurus dan konsisten. Azhar, *Sejarah Daerah Lombok: Arya Banjar Getas*, (Mataram: Yaspem Pariwisata Pejanggiq, 1997), hlm. 21. Sedangkan menurut Arifin Zuhdi; “kata *Lombok* dalam bahasa kawi berarti lurus atau jujur; *Mirah* berarti permata; *Sasak* berarti kenyataan; *Adi* berarti yang baik atau yang utama, maka arti dari keseluruhan adalah kejujuran adalah permata kenyataan yang baik atau utama”. Arifin Zuhdi, *Praktik Merariq “Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2012), hlm. 8-9. Coba kita lihat pada penelitian tesis Kahrudin Sulkhad, *Merarik pada Masyarakat Sasak “Sejarah, Proses dan Pandangan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 77. Dalam wawancaranya dengan Mansur (Desa Mantang, Lombok Tengah) tertanggal 23 Juli 2005, yakni: “*aok si uahke bedoe, inges si inges, laguk endeke tao base sasak, jarin endeke bau jari dengan sasak dait endeke tao jak bekeke jok dengan toakno, dekean iye endah dengan bimeno*” kutipan wawancara ini sama *pervis* dengan

*Kertagama*” karya pujangga Majapahit yang bernama Empu Perapanca abad XIV pada masa kejayaan kerajaan Majapahit (1293-1478), dengan sebutan *Lombok Mirab*, *Sasak Adi* (*Lombok Mirab* untuk daerah Lombok Barat, dan *Sasak Adi* untuk daerah Lombok Timur).<sup>32</sup> Menurut G. Parman dan Selamat Riyadi dalam tulisannya:

*“pada suatu hari, patih Dewi Anjani bernama patih Songan mengingatkan Dewi Anjani akan pesan kakeknya, kakeknya telah berpesan agar kelak Dewi Anjani mengisi pulau Lombok dengan manusia. Kemudian, Dewi Anjani mengajak patih Songan untuk memeriksa seluruh daratan pulau itu. Karena tanaman di hutan terlalu rapat, Dewi Anjani dan patih Songan tidak dapat berjalan dengan leluasa. Dewi Anjani berkata kepada patih Songan. “paman, karena pulau ini penuh sesak dengan tumbuhan, pulau ini kuberi nama pulau sasak”. begitulah ceritanya sehingga pulau ini akhirnya bernama bumi Sasak. Sekarang lebih dikenal dengan nama pulau Lombok.” Dalam bab yang berbeda mereka menyimpulkan: “nama Sasak berasal dari kata “sak-sak” yang berarti “perahu bercadik”. pulau Lombok tidak berarti “pulau pedas”, tetapi seharusnya “pulau lurus”.”<sup>33</sup>*

Ahmad Abd Syukur berpendapat dalam penelitiannya; pulau Lombok adalah pulau yang tidak berpenghuni.<sup>34</sup> Penghuninya berdatangan

---

redaksi kutipan wawancara dalam penelitian Muhammad Sukri, *Identitas Sasak “Pertaruhan & Pertarungan”*, (Mataram: Leppim IAIN Mataram, 2011), hlm. 32.

<sup>32</sup>Pada Pupuh ke 14 *“Nuwah Tangl Guru Sanusari Lombok Mirab Lawantikag Sasak Adi Nikalun Bantayan Len Lunnuk Teken Udamakatrayadhi Sanusa Pupul”*, (maksudnya: bahwa terdapat suatu daerah di mana tempat tersebut ditumbuhi pohon-pohon yang lebat), lihat, Gede Agung, *Kupu-kupu Kuning Menyebrangi Selat Lombok*, (Jakarta; Bhatar, 1964), hlm. 79. lihat juga, Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, (Mataram: Yayasan Sumar Hamid, 1998), hlm. 37.

<sup>33</sup> Lihat, G. Parman dan Selamat Riyadi, *Cerita Rakyat Dari Lombok “Nusa Tenggara Barat”*, (Jakarta: Grasindo, 1993), hlm. 1, 5.

<sup>34</sup> Pada abad ke 13 atau pada tahun 1257 gunung Samalas (gunung Rinjani) meletus yang mengakibatkan letusan hingga ke kutub. diperkirakan penghuni pulau Lombok musnah akibat letusan tersebut, hingga abad selanjutnya para pendatang bermukim di Lombok dan melahirkan generasi-generasi baru yang menamakan diri suku Sasak. Lalu Lukman, *Tata Budaya “Adat Sasak di Lombok*, (Kumpulan Tata Budaya Lombok, 2006), hlm. 7. dalam Babad Lombok digambarkan: para penduduk, raja dan putri berlarian menyelamatkan diri. Jabaran dari hasil penelitian-penelitian terkait meletusnya gunung Rinjani (Samalas) diliris jurnal Internasional, yakni jurnal PNAS edisi September 2013: [www.pnas.org](http://www.pnas.org), yang berjudul, “Source of the Great A.D. 1257 Mystery Eruption Unveiled, Samalas Volcano, Rinjani Volcanic Complex, Indonesia”, media Nasional seperti: Detik.com (<http://news.detik.com/read/2013/10/01/123736/2374226/1513/ditemukan-sisa-letusan-gunung-rinjani-di-kedua-kutub-bumi>), 30-04-2015, 12:00. kompas.com

dari berbagai penjuru pulau Nusantara seperti, Kalimantan, Jawa, Bali, Sumatra, Sulawesi Selatan, Maluku, Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain. Percampuran dari penduduk pertama dan selanjutnya melahirkan generasi-generasi baru suku Sasak, entah itu melalui akulturasi asimilasi dan lain sebagainya.<sup>35</sup> Pendapat Abdul Sakur didukung oleh kata dalam penyebutan Lombok dengan Gurun dalam kitab *Negarakertagama* karya Mpu Prapanca. Alfred Russel Wallace berpendapat orang Sasak dapat dikelompokkan dan diidentifikasi ke dalam keturunan atau ras Melayu,<sup>36</sup> lebih lanjut menurut Sudirman penduduk pertama pulau Lombok adalah suku bangsa atau ras Mongoloid yang berasal dari Asia Tenggara.<sup>37</sup> Dalam kesimpulannya, dahulu penghuni pulau Lombok adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya dengan manusia yang mendiami Gili Manuk-Bali, Malielo-Sumba, Pallawan-Pilipina, dan Goa Tabon-Vietnam Selatan.<sup>38</sup>

Kemudian dari sisi budaya terdapat tanda-tanda bahwa penduduk pulau Lombok seperti halnya pulau Bali pernah mendapat pengaruh ekspansi dari kerajaan Majapahit abad ke 13-14. Pada abad ke 16-17 pulau Lombok bersama Pulau Sumbawa lebih condong ke agama Islam berkat ikatan-ikatan politik dan pernikahan dengan Makasar, sedangkan pulau Bali lebih kuat agama Hindu.<sup>39</sup> Praktik-praktik keagamaan yang singkretik bercampur dengan kebudayaan hidusm masih mengakar dipraktikkan oleh masyarakat sasak di pulau Lombok.

---

(<http://sains.kompas.com/read/2013/10/02/2250336/Letusan.Samalas.dalam.Babad.Lombok.yang.Melumpuhkan.Dunia>), 30-04-2015, 13:00.

<sup>35</sup>Ahmad Abd Syakur, Islam dan Kebudayaan “Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak”, (Yogyakarta: Adab Press, 2006), hlm. 12.

<sup>36</sup>A.R. Wallace, *The Malay Archipelago, the Land of the Orang Utan, and the Bird of Paradise*. (Singapore University Press, 1986-1869), hlm. 182. lihat juga, A.R. Wallace, *Kepulauan Nusantara Sebuah Kisah Perjalanan, Kajian Manusia dan Alam*, terj. Tim Komunitas Bambu, (Depok: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 109-110.

<sup>37</sup>Sudirman, *Gumi Sasak dalam Sejarah*, (Pringgabaya: KSU Prima Guna, 2007), hlm. 3-4.

<sup>38</sup>L. M. Ariadi “Pendapat ini dibuktikan dengan adanya penemuan benda-benda arkeologis di Gunung Piring Desa Truwai Kecamatan Pujut, Lombok Selatan. Benda-benda purbakala yang ditemukan di Desa ini Periuk Utuh, Kereweng, Kerangka Manusia, Arca Budha, Awalokiteswara, Nekara dan batu nisan yang bertuliskan huruf Cina dan Arab.” L. M. Ariadi, *Haji Sasak*, hlm. 60. “orang Sasak merupakan pembauran antara penduuk asli pulau Lombok dan orang-orang dari kerajaan Mataram dan kerajaan Majapahit.” Lihat, G. Parman dan Selamet Riyadi, *Cerita Rakyat dari Lombok “Nusa Tenggara Barat”*, hlm. 5.

<sup>39</sup>I Gede Pamarimatha, *Perdagangan dan politik di Nusa Tenggara 1815-1915*, (Jakarta: KTIILV, 2002), hlm. 37-38.

Di Nusantara, kerajaan-kerajaan yang telah eksis terbagi menjadi dua kategorisasi yaitu, kerajaan Agraris dan kerajaan Maritim. Dalam kerajaan Maritim, birokrasi diperuntukan untuk melayani sebuah ekonomi perdagangan, sedangkan kerajaan agraris memiliki sistem birokrasi berpusat pada raja, penguasaan sumber ekonomi, tenaga kerja serta tanah dan hasil pertanian adalah milik raja (Patrimornial). Kekuasaan raja didistribusikan kepada anggota keluarga dan orang-orang yang dekat dan dianggap berjasa bagi raja, orang-orang ini disebut sebagai *lunggub*, keluarga raja disebut *sentana* sedangkan orang-orang yang membantu dalam penyelenggaraan kekuasaan disebut *abdi dalem*.<sup>40</sup>

Sekitar abad ke-13, di Lombok telah berdiri kerajaan Selaparang yang didirikan oleh Pangeran dari Majapahit. Kerajaan ini merupakan kerajaan Maritim sekaligus agraris, maritim karena merupakan kerajaan pesisir yang membangun hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar (*barbor state*), disebut kerajaan agraris karena terbukti bahwa pulau Lombok di masa itu terkenal dengan pulau penghasil beras.<sup>41</sup> Ia menguasai seluruh wilayah di pulau Lombok, namun setelah runtuhnya Majapahit banyak kerajaan-kerajaan kecil memisahkan diri dari kerajaan Selaparang, salah satunya kerajaan Pejanggik. Selanjutnya pada tahun 1640, wilayah itu juga dikusai oleh Kesultanan Makasar, sehingga kerajaan Pejanggik, Selaparang serta kerajaan-kerajaan kecil lainnya mengakui kekuasaan Kesultanan Makasar. Di saat inilah Islamisasi di Lombok dimulai bersamaan dengan datangnya *Mubaligh* Islam dari Jawa Timur yakni Pangeran Prapen (anak dari Sunan Giri) ditugaskan untuk berdakwah di pulau-pulau nusa tenggara pada tahun 1609.<sup>42</sup>

Hari ini, agak sulit untuk menjeneralisir bahasa, budaya dan adat istiadat Lombok secara keseluruhan, karena perbedaan-perbedaan yang begitu mencolok dari praktik-praktik interaksi antar setiap daerah: Dusun, Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Satu Dusun akan berbeda bahasa dengan Dusun yang lain, pun demikian dengan adat dan budaya yang mereka anut. Dalam penelitian Jeremy Kingsley yang berjudul “Tuan Guru, Community and Conflict in Lombok, Indonesia” memaparkan:

---

<sup>40</sup>Priyo Budisantoso, Birokrasi Pemerintah Orde Baru “Persepektif Cultural dan Structural”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 38.

<sup>41</sup>Zakaria, Mozaik Budaya Orang Mataram, hlm. 44.

<sup>42</sup>Asnawi, “Islam dan Visi Kebangsaan di Nusa Tenggara Barat”, dalam Komaruddin Hidayat et al, menjadi Indonesia, 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara, (Bandung : Mizan, 2006), hlm. 299, Lihat juga Darmawijaya, Kesultanan Islam Nusantrara, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 149, 151.

*“To research the whole of Lombok is difficult because of significant political, cultural and religious diversity. Adat practices, for instance, vary among the Sasak across the island, in fact, “Sasak adat varies in each village”. (Ruth Krulfeld, 1966) An example of this is the traditional Sasak dance party, known as a ‘joget’. These events are usually held in local communities to celebrate upcoming weddings or other festive occasions. This cultural practice comes from Bali – it is, in fact, part of the Balinese colonial legacy in Lombok, discussed further below. (David Harnish, 2005) This celebration involves two or three female dancers performing a traditional dance with male members and guests of the community, accompanied by a traditional Sasak orchestra. The beautifully dressed woman dances seductively with male members of the community..... This tradition is often referred to as seksi dancing (sexy dancing) because of its provocative nature, although, no touching is allowed. At the end of each song the women dancer is paid by the man who has had the privilege of dancing with a beautiful woman. This is a broadly acceptable social activity in West Lombok, (Sven Cederroth, 1981, Erni Budiwanti, 2000, Leena Avonius, 2004, John MacDougall, 2005). however, in East Lombok, which has been less influenced by Balinese practices, many Tuan Guru actively discourage this practice”<sup>43</sup>*

Ia mengakui begitu sulitnya menjeneralisir Lombok jika ingin diteliti oleh karena politik, keberagaman budaya, adat istiadat dan agama, ditambah dengan perbedaan-perbedaan warisan kolonial (Majapahit, Kerajaan Goa, Kerajaan Karangasem, Belanda dan Jepang) seperti digambarkan di atas, Lombok Barat lebih dekat dengan pulau Bali di mana perayaan joget erotis diperbolehkan, sedangkan di Lombok Timur begitu keras ditentang. Lombok Tengah dikenal dengan ‘Pagah Praye’-nya, Lombok Utara dikenal dengan Wetu Telunya.

---

<sup>43</sup>Kingsley, J. J. (2010). Tuan Guru, Community and Conflict in Lombok, Indonesia. PhD thesis, Law, The University of Melbourne. Persistent Link: <http://hdl.handle.net/11343/35693> lihat juga. Ruth Krulfeld, ‘Fatalism in Indonesia: Comparison of Socio-Religious Types on Lombok’ (1966) 39 *Anthropological Quarterly*, hlm. 180, 181, David Harnish, ‘Isn’t This Nice? It’s Just Like Being in Bali: Constructing Balinese Music Culture in Lombok’ (2005) 14 *Ethnomusicology Forum* 3. Sven Cederroth, *The Spell of the Ancestors and the Power of Mekkah – A Sasak Community on Lombok* (1981); Erni Budiwanti, *Islam Sasak – Waktu Telu Versus Waktu Lima* (2000); Leena Avonius, *Reforming Wetu Telu: Islam, Adat, and the Promises of Regionalism in Post-New Order Lombok* (2004); John MacDougall, *Buddhist Buda or Buda Buddhists? Conversion, Religious Modernism and Conflict in the Minority Buda Sasak Communities of New Order and Post-Soebarto Lombok* (PhD Thesis, Princeton University, 2005).

Pulau Lombok dengan luas wilayah 4.738,70 Km<sup>2</sup> (23,51 %) adalah salah satu dari beberapa pulau yang terletak di sebelah timur kawasan Indonesia. Pulau Lombok terdiri dari beberapa wilayah, yaitu: Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Timur dan Lombok Tengah.<sup>44</sup> Ada perbedaan antara jenis kesuburan, permukaan serta iklim di pulau Lombok, terdapat gunung-gunung aktif yaitu gunung Rinjani dengan ketinggian 3.775 m di atas permukaan laut, gunung Punikan dengan ketinggian 1.490 m di atas permukaan laut, gunung Sangkareang dengan ketinggian 2.914 m di atas permukaan laut serta gunung Nangi dengan ketinggian 2.330 m di atas permukaan laut.<sup>45</sup>

Dalam sejarahnya, pulau Lombok pada tanggal 19 Agustus 1945 masuk ke dalam wilayah Sunda Kecil (pulau Bali, pulau Lombok, pulau Sumbawa, Flores, Timor, Rote, Sumba dan Sawu). Sunda Kecil ber-ibu kota di Singaraja (pulau Bali) dengan Gubernur bernama I Gusti Ketut Pujda. Kemudian setelah terjadi pemisahan menjadi tiga provinsi pada tanggal 14 Agustus 1958 (Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB dan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT).

### 1. Kekuasaan Karismatik Lombok

Cerita tentang karisma Ken Arok sebagai titisan dewa Wisnu (Jawa) yang selanjutnya dibingkai menjadi pembirokrasian otoritas tradisional dari kepercayaan bahwa Ken Dedes adalah wanita *Nareswari* yakni raja perempuan yang kemudian ditafsirkan sebagai wanita biasa yang akan melahirkan raja-raja, dan berkat perkawinannya dengan Ken Arok ia menjadi ibu yang menurunkan raja-raja Singasari dan Majapahit kemudian Ken Arok menjadi moyang raja-raja tersebut. Setiap raja ketika mangkat selalu dicandikan untuk diziarahkan atau tempat pemujaan.

Pola penerapan birokrasi dan kekuasaan di pulau Lombok dimulai pada pergantian kekuasaan; kerajaan Majapahit (pada abad ke 14), kesultanan Makasar (pada tahun 1640), kerajaan Bali (sekitar abad ke-17), kolonial Belanda dan Jepang (1942 dan 1945) dari pergantian kekuasaan di atas akan diterapkan sistem birokrasi yang berbeda dari sebelumnya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Barat 2013.

<sup>45</sup> BPS Cabang Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2001, (Mataram: Bps Cabang Mataram, 2002).

<sup>46</sup>“Orang Jawa, Makasar, Bugis, Bali, Belanda dan Jepang berhasil menguasai Lombok lebih kurang satu millennium. Kerajaan Hindu-Majapahit dari Jawa Timur, masuk ke Lombok pada abad ke-7 dan memperkenalkan Hindhu-Budhisme ke kalangan orang Sasak. Setelah dinasti Majapahit jatuh, agama Islam dibawa untuk pertama kalinya oleh para raja Jawa Muslim pada abad ke-13 ke kalangan orang Lombok dari Barat laut. Islam segera menyatu dengan ajaran sufisme Jawa yang penuh mistikisme. Orang-orang

Kesamaan pola pikir ini, antara Hinduisme Jawa Kuno dengan Hinduisme Lombok Kuno dapat dilihat dari fakta bahwa pulau Lombok telah dikuasai oleh Majapahit pada abad ke 14 yakni tahun 1343.<sup>47</sup> Dalam *Negarakertagama* karya Mpu Prapanca, pupuh 13 dan 14 menceritakan tentang daerah-daerah diluar Jawa yang dikuasai oleh Majapahit abad ke 14, salah satunya Lombok atau Gurun yang dihuni oleh suku Sasak.<sup>48</sup> Timbulnya kerajaan di Lombok menurut peneliti, bermula dari timbulnya sosok karimatik sebagai ratu adil yang akan menyelamatkan dunia dari malapetaka. Kemudian dalam perjalanannya, tokoh karimatik dalam suku Sasak tersebut akan didaulat menjadi raja hingga keturunan-keturunannya secara tradisional.

Di era kontemporer saat ini, kerajaan-kerajaan di Lombok kuno hanya tinggal sejarah,<sup>49</sup> yang tertinggal hanyalah gelar-gelar kebangsawanan

Makasar tiba di Lombok Timur pada abad ke-16 dan berhasil menguasai Selaparang (kerajaan orang Sasak asli).... berhasil mendakwahkan Islam Sunni... meskipun kebanyakan mereka masih mencampurkan Islam dengan kepercayaan lokal yang non-Islami. Kerajaan Bali dari Karangasem menduduki pulau Lombok Barat sekitar abad ke-17, dan kemudian mengkonsolidasikan kekuasaannya terhadap seluruh Lombok setelah mengalahkan kerajaan Makasar pada tahun 1740.... kekalahan ini mendorong para bangsawan Sasak meminta campur tangan militer Belanda untuk mengusir kerajaan Bali.... Belanda berhasil menaklukan dan mengusir kerajaan Bali dari Lombok, kemudian menjadi penjajah baru terhadap Sasak.... Jepang menggantikan Belanda di Lombok untuk suatu periode yang singkat antara 1942 dan 1945. Lombok merdeka pada tahun 1946 sebagai bagian dari Indonesia...” Lihat Erni Budiwanti, *Islam Sasak “Wetu Telu versus Watu Lima”*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 9-10. Belanda menguasai Lombok dari tahun 1894-1942, Henk Sculte Nordholt dan Gerry Van Klinken et al, *Politik Lokal di Indonesia*, hlm. 377. Sebagaimana di kutip Jamaludin dalam Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935*, hlm. 4.

<sup>47</sup> “kekuasaan Majapahit secara politik telah berakhir namun secara budaya masih sangat kental mengakar di masyarakat Sasak. Lihat, Slamet Muljana, *Tafsir Sejarah Negarakertagama*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 161. Penerimaan ajaran Hindu di masyarakat Sasak menurut Abd Syakur sangat wajar, karena Lombok sebelum itu mempunyai kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Dan agama Hindu sendiri diperkirakan masuk pada abad ke 11, jadi perbedaan antara ajaran Hindu dengan kepercayaan sebelumnya sangat sedikit. lihat Ahmad Abd Syakur, *Islam dan Kebudayaan “Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak”* hlm, 31.

<sup>48</sup> Pulau ini hingga sekarang menunjukkan adanya pengaruh kuat dari Majapahit, sehingga penguasaan Lombok tidak diragukan. *Ibid*, hlm.161,162,346.

<sup>49</sup> “Bentuk-bentuk pemerintahan yang paling awal pada umumnya ditandai dengan pelbagai kerusakan parah dan irasionalitas-irasionalitas yang menyebabkan runtuhnya jenis-jenis pemerintahan itu sekarang, sebaliknya, demokrasi liberal dianggap bebas dari pelbagai kontradiksi internal yang fundamental seperti ini.” Lihat, F Fukuyama, *The End of History and the Last Man “Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal”*, (Yogyakarta: Qalam, 2004), hlm. 1.



dan birokrasi-birokrasi keadatan, itu pun pada saat ini mengalami ancaman degradasi dari modernisasi. Ancaman itu timbul ketika orang-orang nusantara sepakat membentuk Negara modern (*nation state*) pasca terbebasnya bangsa-bangsa terjajah itu (pulau-pulau di Indonesia sekarang)dari Belanda dan Jepang. Atas dasar “senasip dan seperjuangan” mereka menamai Negara Bangsa “*nation state*” tersebut dengan nama Indonesia.

## 2. Kekuasaan Tradisional Menuju Kekuasaan Rasional

Pola birokrasi kekuasaan tradisional, kerajaan-kerajaan kuno di pulau Lombok tampak teratur. Raja menjadi pusat dari kekuasaan yang memerintah kemudian dibantu oleh dewan kerajaan, pembagian kekuasaan kepada daerah dipercayakan kepada perwakilan dari raja yang mendapatkan otoritas turunan atas nama raja, biasanya orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang masih terdapat hubungan darah dengan raja, atau orang-orang yang dengan loyalitas dan penghargaan terhadap raja. Di bawah otoritas orang-orang utusan di setiap daerah itu yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat, juga terdapat ketua, kepala-kepala yang sesungguhnya lebih berkuasa di lingkungannya sendiri. Hirarki kekuasaan ini dapat ditemukan dalam gambaran tentang konsep-konsep Max Weber mengenai sistem politik Patrimonial.<sup>50</sup>

Patrimonial dalam pengertian Weber yakni di mana seluruh kekuasaan mengalir langsung dari sang pemilik kekuasaan, yang dimaksud di sini adalah raja. Segala apa yang dikatakan oleh raja akan menjadi undang-undang dan bahkan agama raja pun menjadi agama rakyatnya. Weber menulis tentang patrimonialisme sebagai bentuk dominasi otoritas tradisional. Pada awalnya berpusat pada struktur keluarga terutama kekuasaan ayah dalam keluarga (Patriarki).<sup>51</sup> Sedangkan argumen menyeluruh Weber ialah bahwa dengan jalan modernitas, bentuk patrimonial birokrasi tradisional akhirnya akan memberi jalan untuk

---

<sup>50</sup>Sebagaimana dikutip oleh I Gede Parimartha dalam R. Bendix, Max Weber On Intellectual Portrait, (New York: Anchor Books, Doubleday & Company Inc., 1962), hlm. 334-336. lihat pada I Gede Pamarimatha, Perdagangan dan politik di Nusa Tenggara 1815-1915, (Jakarta: KTILV, 2002), hlm. 2-3.

<sup>51</sup>Dalam analisis Weber tentang patrimonial, ia membaginya menjadi dua bagian. *pertama*, salah satu bentuk patrimonialisme ditandai dengan struktur *Top-Down*, di mana seorang penguasa (raja, kaisar, sultan) berkuasa atas dasar memiliki otoritas yang sah melalui pejabat birokrasi tradisional (misalnya; kasim); *Kedua*, struktur yang masih *Top-Down* tapi memiliki kekuasaan yang sah di luar kewenangan penguasa pusat.

rasionalisme birokrasi kapitalis modern sebagai prinsip utama baik pemerintah maupun pemerintahan.

Di pulau Lombok kuno (*Lombok Mirab Sasak Adi*) dalam sejarahnya menjalankan sistem birokrasi kerajaan patrimonial, mulai dari penguasa pertama di pulau itu yakni kerajaan selaparang yang banyak dipengaruhi oleh kerajaan Majapahit. Setelah Majapahit runtuh tahun 1478 M, tumbuh kerajaan-kerajaan kecil yang merdeka seperti Kerajaan Pejanggik, Kerajaan Langko, Kerajaan Sokong, Kerajaan Parwa, Kerajaan Bayan serta kerajaan-kerajaan yang lebih kecil dalam bentuk desa-desa, seperti Pujut, Kedaro, Kuripan, Tempit, Batu Dendeng dan Ketawang.<sup>52</sup> dalam beberapa literatur tidak terdapat informasi mengenai sistem birokrasi kekuasaan kerajaan-kerajaan kecil di Lombok akibat dari kekurangan data tentang jejak-jejak kerajaan seperti artefak, prasasti, piagam dan sebagainya. Namun peneliti meyakini bahwa pola birokrasi yang di terapkan sama halnya dengan pola yang dipakai oleh kerajaan Majapahit dan kerajaan Selaparang.

Masuknya Makasar<sup>53</sup> memberikan corak baru bagi sistem birokrasi tradisional di Lombok sebab pola birokrasi yang diterapkan oleh Makasar adalah pola Kesultanan,<sup>54</sup> pusat kekuasaan terdapat pada Sultan dan biasanya didampingi oleh Kasim (penasehat) corak keislaman mewarnai

<sup>52</sup>Ahmad Abd Syakur, Islam dan Kebudayaan “*Akulturasinya Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak*”, hlm. 32.

<sup>53</sup>“kerajaan Gowa Makasar berhasil menguasai kedua daerah Nusa Tenggara Barat, kerajaan-kerajaan di Sumbawa Barat dimasukan ke dalam kekuasaan kerajaan Gowa tahun 1618, Bima ditaklukkan pula pada tahun 1633, Selaparang tahun 1640 tunduk dan demikian pula daerah-daerah lainnya sehingga pada abad ke 17 seluruh kerajaan Islam Lombok ada di bawah pengaruh kekuasaan Gowa”. dikutip dari, Nugroho Notosusanto, et al, *Sejarah Nasional Indonesia: “Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia”* Cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 72.

<sup>54</sup>“Sultan dibantu oleh suatu dewan yang disebut *Kasuwiyang Salapanga* (pangabdi sembilan), kemudian diubah menjadi *Bate Salapanga* (bendera sembilan). Sebagai pembantu sultan yang menjalankan undang-undang pemerintahan, majelis diawasi oleh seorang pemimpin yang disebut *Paccalaya* (hakim). Setelah Sultan, jabatan tertinggi di bawahnya adalah *Pabbicarabutta* yang dibantu oleh *Tumailalang Matowa* dan *Tumailalang Malolo*. *Tumailalang Matowa* bertugas sebagai pegawai tinggi yang menyampaikan perintah raja kepada majelis *Bate Salapanga*. Adapun *Tumailalang Malolo* adalah pegawai tinggi urusan istana. Panglima yang memimpin tentara dalam perang disebut *Anrong Guru Lompona Tumakjannangang*. Mereka bergelar *Karaeng* atau *Gallareng*. Ada lagi jabatan yang disebut *Opu Bali Ranten*, yaitu bendahara kerajaan. Selain sebagai bendahara, ia juga mengurus masalah perdagangan dan hubungan ke luar. Bidang agama diurus oleh seorang *kadhi* yang dibantu oleh *imam*, *kehatib*, dan *bilal*.”  
<http://www.cpuik.com/2013/10/sejarah-kerajaan-gowa-tallo-makassar.html> diakses, kamis, 9-4-2015. 10:26.

birokrasi kekuasaan sementara di Lombok sampai masuknya kerajaan Karang Asem Bali menduduki Lombok bagian barat. Kerajaan Karang Asem karena kerajaan yang bercorak Hindu paling tidak menerapkan hirarki otoritas kasta dalam kitab Weda yaitu, kasta *Brahma* yang terdiri dari para pendeta (sasak; *mangku*), kasta *Ksatria* yang terdiri dari para raja dan Senopati (panglima perang), kasta *waisya* yang terdiri dari orang-orang pedagang dan kasta *Sudra* terdiri dari orang-orang biasa, para tukang kayu, pekerja kasar kemudian kasta ini tidak diperbolehkan membaca kitab Weda.<sup>55</sup>

Sejalan dengan transisi kekuasaan Islam Makasar dan Hindu Bali, timbul otoritas baru yang timbul dari rakyat yaitu para tuan guru Tahun 1740-1935, baik melalui para *Mubaligh* Jawa Timur (Sunan Prapen)<sup>56</sup> maupun Islamisasi Makasar. Otoritas ini yang peneliti asumsikan sebagai otoritas karismatik, karena ia hadir sebagai ratu adil,<sup>57</sup> penolong bagi para golongan yang tak berkasta, pioneer dalam berperang, pemberi nasehat bagi sesamanya. Namun dari proses panjang pergantian kekuasaan itu mengakibatkan terlahirnya kaum *Panjak* (pengikut, pesuruh) dalam masyarakat Sasak. Hal ini pula terjadi pada era tuan guru, sampai datangnya Belanda yang diundang oleh kaum bangsawan Sasak untuk mengusir Kerajaan Karang Asem Bali, dibantu oleh para tuan guru namun Belanda ibarat "*ular yang mematok tuannya*", mengambil alih kekuasaan Bali dan menjajah pulau itu. Di masyarakat Sasak otoritas informal tuan guru semakin kuat sedang otoritas para bangsawan semakin mengikis yang sebelum kekuasaan Bali berkuasa, para bangsawan Sasak memegang kedudukan tinggi.<sup>58</sup> Sampai kepada corak pemerintahan kolonial Belanda, Jepang dan Indonesia modern dengan otoritas legal-rasional yang ditandai dengan aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian yang mereka selenggarakan mendekati apa yang dimaksud model birokrasi legal-rasional dari Max Weber.

---

<sup>55</sup>Ahmad Abd Syakur, Islam dan Kebudayaan "*Akulturasinya Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak*", hlm. 29.

<sup>56</sup> Lebih lanjut cerita tentang Sunan Prapen dan sepek terjangnya lihat. Lalu Wacana, *Babad Lombok*, (Jakarta: Depdikbud, 1979).

<sup>57</sup> "The charismatic leader gains and maintains authority solely by proving his strength in life. If he wants to be a prophet, he must perform miracles; if he wants to be a war lord, he must perform heroic deeds. Weber, *On Charisma and Institution Building*, hlm. 22. Lihat juga, Fath Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram.*, hlm. 188.

<sup>58</sup> Pamarimatha, *Perdagangan dan Politik.* .. hlm. 11.

### 3. Birokrasi Orang Sasak Kuno

Biasanya dalam struktur pemerintahan model kerajaan terdapat hirarki yang seluruh kekuasaan terpusat pada raja, raja biasanya dibantu oleh seorang *patih*, *mangkubumi*, *dipati*, *rangga*, *kenuruban*, *tumenggung*, *nyaka*, dan *demung* yang mempunyai spesifikasi tugas masing-masing. Dalam pelaksanaan birokrasi kerajaan selaparang di dalam berbagai literatur di katakan, terdapat golongan *pekanggo* (pembesar) dan *pembekel* (bendahara negeri), keduanya disebut *nyaka mantri* atau pejabat teras, kemudian *pengrasa' beleg* dan *beriq* (penguasa wilayah tingkat tinggi dan tingkat rendah).<sup>59</sup>

Tugas dari seorang *patih* sebagaimana Patih Gajah Mada sebagai perdana menteri dalam negara modern, ia bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan kerajaan. Seorang *dipati* dipercayakan memimpin bidang pertahanan dan keamanan yang dibantu oleh *nyaka*. Seorang *rangga* ditugaskan untuk mempersiapkan perbekalan dan persenjataan. Seorang *kanuruban* mengurus masalah keuangan kerajaan dan tenaga kerja. Seorang *tumenggung* bertanggungjawab dalam urusan perbaikan dan rehabilitasi gedung kerajaan. Seorang *demung* ditugaskan memimpin wilayah *kedemungan*, yaitu wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan. Terakhir, seorang *nyaka* ditugaskan untuk memimpin diwilayah yang lebih kecil yakni *kenyakaan* (desa) yang merupakan wilayah kekuasaan *kedemungan*.<sup>60</sup>

Selanjutnya, sekitar abad 18 setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan di Lombok dengan ditaklukan oleh kerajaan Karang Asem Bali, sistem hirarki birokrasi pun mengalami perubahan-perubahan termasuk istilah jabatan yang digunakan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan raja yang dibantu oleh seorang *punggawa* (menteri), selanjutnya seorang *pekanggo* akan memimpin suatu wilayah tertentu dan akan diawasi oleh *pegusti*. Biasanya, *pekanggo* ini adalah orang pribumi, suku Sasak. *Pemekel* akan memimpin desa, di bawah hirarki seorang *pekanggo*, sedangkan di bawah *pemekel* terdapat *keliang* atau kepala Dusun atau kampung.<sup>61</sup>

<sup>59</sup>Ahmad Abd Syakur, Islam dan Kebudayaan "Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak", hlm. 155.

<sup>60</sup>*Ibid*, lihat juga Harry Waluyo, et al, Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Daerah Nusa Tenggara Barat, (Mataram: Depdigbud, 1986), hlm. 20.

<sup>61</sup>Penting dicatat, pada penelitian Erni Budiwanti dengan bukunya yang berjudul Islam Sasak, diterbitkan pada tahun 2000 menemukan hirarki tradisional yang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat Desa Bayan Lombok Utara yaitu; *Pemangku*, *Perumbak*, *Toaq Lokaq*, dan *Kiai*. lebih lanjut baca. Erni Budiwanti, Islam Sasak, hlm. 202, 206, 208.

Setelah masuknya Belanda pada tahun 1894 dan mengusir Kerajaan Karang Asem, sistem birokrasi pun berubah.<sup>62</sup> Sebelumnya pada tahun 1882, berdasarkan Ind. Stbl. No. 123, Pulau Lombok pada masa kolonial Belanda termasuk ke dalam Resident Bali yang berpusat di Singaraja.<sup>63</sup> Lombok kemudian, yang dulunya terbagi menjadi dua wilayah dengan nama asli “Lombok Mirah, Sasak Adi” namun ketika masa Belanda terbagi menjadi tiga wilayah yaitu Lombok Barat dengan ibu kota di Mataram, Lombok Tengah dengan ibu kota di Praya, Lombok Timur dengan ibu kota di Selong.

Istilah *kedemungan* (Majapahit, Selaparang), *pekanggoan* (Bali) berganti menjadi *onder afdeeling* yang dipimpin oleh seorang *controleur*, *onder afdeeling* ini kemudian terbagi menjadi beberapa *kedistrikian* (kecamatan) yang dipimpin oleh *distrik*. seorang kapala *distrik* akan membawahi kepala desa dan seorang kepala desa akan membawahi dasan yang dipimpin oleh seorang *keliang*.<sup>64</sup> Setelah pemerintah kolonial Belanda memberikan kebebasan penduduk mengatur pengadilannya sendiri, dengan keputusan no 185 dan 18 tahun 1895, terbentuklah “*kerama desa*” maka segala keputusan melalui Raad Sasak dengan surat keputusan di atas menjadi kuat.<sup>65</sup> Masuknya Jepang ke pulau Lombok tidak banyak merubah sistem

---

<sup>62</sup>Kedudukan penjajahan Belanda di Indonesia hampir selama 350 tahun. Dasman Djamaluddin, Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat dan Supersemar, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 6.

<sup>63</sup>Lebih lanjut lihat, Sudirman, Gumi Sasak dalam Sejarah, bagian 2, (Pringgabaya: KSU “Primaguna” dan Pusat Studi dan Kajian Budaya, 2012), hlm. 8.

<sup>64</sup>Lihat, Ahmad Abd Syakur, Islam dan Kebudayaan “*Akulturas* Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak”, hlm. 156. Pemerintahan kolonial Belanda tidak terlalu mempersoalkan bentuk pemerintahan jajahannya karena ia fokus kepada kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik, sehingga otoritas rakyat pribumi (priayi) sangat diuntungkan, hal ini dapat dilihat dalam tulisan Sutherland yang dikutip oleh Priyo Budisantoso; “...terdapat keyakinan umum di kalangan penguasa-penguasa kolonial, bahwa penghormatan rakyat kepada pejabat-pejabat pribumi yang menjamin keselamatan kehadiran Belanda di Jawa (maupun di Lombok), paling tidak dipertahankan dengan menjaga agar korps (birokrasi) itu tetap tradisional” lihat Priyo Budi Santoso, Birokrasi Pemerintah Orde Baru “Perspektif Cultural dan Struktural, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 42. lihat juga pembahasan tentang birokrasi dan proses yang dilakukan oleh Belanda untuk memproduksi priayi Sasak dalam; Fath Zakaria, Mozaik Budaya Orang Mataram, hlm. 181-185.

<sup>65</sup>Fungsi *kerama desa* ini dalam masyarakat Sasak antara lain; Menyelesaikan persoalan sengketa yang terjadi di dalam desanya dengan tugas mendamaikan, menyelesaikan persoalan orang *merari* (kawin dan segala prosesnya), mengenai ikut campurnya orang-orang desa lain di dalam desa yang bukan wewenangnya. Lihat. Lalu Lukman, Tata Budaya Adat Sasak di Lombok, (Kompulan Tata Budaya Lombok, 2006), hlm.7-10.

birokrasi yang ada, hanya saja Jepang merubah istilah yang ada dengan istilah bahasa Jepang seperti; *Controleur* menjadi *Bun Ken Kanrikan*, kepala *distrik* menjadi *Gunco*, kepala desa menjadi *Sun Co*.<sup>66</sup> otoritas tertinggi dalam pendudukan jampang adalah Ken Kan Rikan, jabatan-jabatan lainnya dibuat untuk menopang kekuasaan di atas seperti: kepolisian, urusan bahan makanan dan urusan pemotongan hewan.<sup>67</sup>

### C. Penutup

Pola birokrasi kekuasaan suku sasak mengalami banyak perkembangan. Perkembangan tersebut dikarenakan banyaknya pengaruh dari luar dan upaya mempertahankan budaya sendiri.

Pola birokrasi kekuasaan suku sasak tradisional adalah sistem patrimonial dalam pengertian Weber, di mana kerajaan-kerajaan kuno di pulau Lombok tampak teratur. Patrimonial yakni di mana seluruh kekuasaan mengalir langsung dari sang pemilik kekuasaan, yang dimaksud di sini adalah raja. Segala apa yang dikatakan oleh raja akan menjadi undang-undang dan bahkan agama raja pun menjadi agama rakyatnya. Suku sasak tradisional banyak dipengaruhi oleh kerajaan Majapahit mulai dari penguasa pertama di pulau itu yakni kerajaan selaparang.

Masuknya Makasar memberikan corak baru bagi sistem birokrasi tradisional di Lombok yaitu pola Kesultanan, pusat kekuasaan terdapat pada Sultan dan biasanya di dampingi oleh Kasim (penasehat) corak keislaman mewarnai birokrasi kekuasaan sementara di Lombok sampai masuknya kerajaan Karang Asem Bali menduduki Lombok bagian barat.

---

<sup>66</sup>Pemerintah Hindia Belanda (Belanda) di Indonesia berakhir dengan menyerah tanpa syarat kepada Dai Nippon (Jepang) pada 9 maret 1942 di lapangan terbang kalijati. sejak ini dimulailah era penjajahan Jepang di Indonesia dan berkumandanglah semboyan anti-barat. sebaliknya, terdengarlah di mana-mana teriakan, "*Asia untuk bangsa Asia*," sesuatu semboyan jepang untuk mengambil hati orang asia di dalam rangka ingin menjajah Negara-negara di kawasan itu, termasuk Indonesia. Untuk menopang dan berusaha melestarikan kekuasaannya di Indonesia dan memenangkan "Perang Asia Timur Raya" Jepang membentuk pasukan HEIHO, sebagai pasukan bantuan bagi tentara Jepang... Juga dengan undang-undang bala tentara Jepang yang terkenal dengan Osamu Seirei No. 44, Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943 membentuk Pasukan Pembela Tanah Air (Peta)." Dikutip dari, Dasman Djamaluddin, Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat, hlm. 6.

<sup>67</sup>Masyarakat Lombok lebih mederita dibandingkan dengan pendudukan Belanda, para pemuda yang berumur 14-22 tahun diambil untuk dijadikan *Seinendan*, umur 23-35 tahun dijadikan *Keibodan*, umur 18-25 menjadi *Heibo*. lebih lanjut lihat. Lebih lanjut lihat, Sudirman, Gumi Sasak dalam Sejarah, bagian 2, (Pringgabaya: KSU "Primaguna" dan Pusat Studi dan Kajian Budaya, 2012), hlm. 19.

Kerajaan Karang Asem karena kerajaan yang bercorak Hindu paling tidak menerapkan hirarki otoritas kasta dalam kitab Weda yaitu, kasta *Brahma* yang terdiri dari para pendeta (sasak; *mangku*), kasta *Ksatria* yang terdiri dari para raja dan Senopati (panglima perang), kasta *waiyya* yang terdiri dari orang-orang pedagang dan kasta *Sudra* terdiri dari orang-orang biasa, para tukang kayu, pekerja kasar kemudian kasta ini tidak diperbolehkan membaca kitab Weda.

Transisi kekuasaan Islam Makasar dan Hindu Bali, timbul otoritas baru yang timbul dari rakyat yaitu para tuan guru baik melalui para *Mubaligh* Jawa Timur maupun Islamisasi Makasar. Otoritas ini adalah otoritas karismatik, karena ia hadir sebagai ratu adil, penolong bagi para golongan yang tak berkasta, pioneer dalam berperang, pemberi nasehat bagi sesamanya. Namun dari proses panjang pergantian kekuasaan itu mengakibatkan terlahirnya kaum *Panjak* (pengikut, pesuruh) dalam masyarakat Sasak. Hal ini pula terjadi pada era tuan guru, sampai datangnya Belanda yang diundang oleh kaum bangsawan Sasak untuk mengusir Kerajaan Karang Asem Bali, dibantu oleh para tuan guru namun Belanda mengambil alih kekuasaan Bali dan menjajah pulau itu.

Di masyarakat Sasak otoritas informal tuan guru semakin kuat sedang otoritas para bangsawan semakin mengikis yang sebelum kekuasaan Bali berkuasa, para bangsawan Sasak memegang kedudukan tinggi. Sampai kepada corak pemerintahan kolonial Belanda, Jepang dan Indonesia modern dengan otoritas legal-rasional yang ditandai dengan aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian yang mereka selenggarakan mendekati apa yang dimaksud model birokrasi legal-rasional dari Max Weber.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Leemann, *Internal and external factors of socio-cultural and socio-economic dynamics in Lombok* "Nusa Tenggara Barat", Zurich: Geographisches Institut Abt. Antropogeographie Universitat Zurich, 1989.
- A. Polak, *Traité En Tweespalt In Een Sasake Boerengemeenschap, Lombok-Indonesie* (Amsterdam: Koninklijk Instituut Voor De Troepen, 1978
- A.R. Wallace, *Kepulauan Nusantara Sebuah Kisah Perjalanan, Kajian Manusia dan Alam*, terj. Tim Komunitas Bambu, (Depok: Komunitas Bambu, 2009.

- A.R. Wallace, *The Malay Archipelago, the Land of the Orang Utan, and the Bird of Paradise*. (Singapore University Press, 1986-1869).
- A.van Der Kraan, *Lombok, Conquest, Colonization, and Underdevelopment, 1870-1940* (Singapore: HES, 2980
- Abd Muin Salim, *Fiqh Siyasah "Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran"*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Ahmad Abd Syakur, *Islam dan Kebudayaan "Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak"*, Yogyakarta: Adab Press, 2006
- April Carter, *Otoritas dan Demokrasi*, Jakarta: Rajawali, 1985
- Arifin Zuhdi, *Praktik Merariq "Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2012.
- Komaruddin Hidayat et al, *Menjadi Indonesia, 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Bandung : Mizan, 2006
- BPS Cabang Mataram, *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2001*, Mataram: Bps Cabang Mataram, 2002.
- Cuisinier, Jeanne (1959). "La Guerre des Padri (1803-1838-1845)". Archives de Sociologie des Religions. Centre National de la Recherche Scientifique. Perang Diponegoro di Jawa sekitar tahun 1825-1830. Dan perang Aceh sekitar tahun 1873-1904.
- Darmawijaya, *Kesultanan Islam Nusantrara*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Dasman Djamaluddin, *Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat dan Supersemar*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- David Harnish, 'Isn't This Nice? It's Just Like Being in Bali: Constructing Balinese Music Culture in Lombok' (2005) 14 *Ethnomusicology Forum*
- Erni Budiwanti, *Islam Sasak "Wetu Telu versus Watu Lima"*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- F Fukuyama, *the End of History and the Last Man "Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal"*, Yogyakarta: Qalam, 2004..
- Fath Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*.
- G. Parman dan Selamat Riyadi, *Cerita Rakyat Dari Lombok "Nusa Tenggara Barat"*, Jakarta: Grasindo, 1993.



- Gede Agung, *Kupu-kupu Kuning Menyebrangi Selat Lombok*, Jakarta; Bhatara, 1964
- Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Hans Hägerdal, War and culture: Balinese and Sasak Views on Warfare in Traditional Historiography, IP Publishing Ltd & <http://www.jstor.org>, 2004
- Harry Waluyo, et al, *Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Daerah Nusa Tenggara Barat*, Mataram: Depdibud, 1986.
- Henk Sculte Nordholt dan Gerry Van Klinken et al, *Politik Lokal di Indonesia*,
- I Gede Pamarimatha, *Perdagangan dan politik di Nusa Tenggara 1815-1915*, Jakarta: KTILV, 2002..
- I Gede Parimatha dalam R. Bendix, *Max Weber On Intellectual Portrait*, New York: Anchor Books, Doubleday & Company Inc., 1962
- Ide Anak Agung Gede Agung, *Bali pada Abad XVIII*, Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press, 1989.
- Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935*, Jakarta: Litbang Kementerian Agama RI, 2011.
- Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935*.
- Jamaludin, *Tuan Guru dan Dinamika Politik Kharisma dalam Dialektika Teks Suci Agama: Strukturasi Makna Agama dalam Kehidupan Masyarakat*, Irawan Abdullah, et al. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008.
- Jhon M. MacDougall, *Kriminalitas dan Ekonomi Politik Keamanan di Lombok*. dalam Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- John MacDougall, "Buddhist Buda or Buda Buddhists? Conversion, Religious Modernism and Conflict in the Minority Buda Sasak Communities of New Order and Post-Soeharto Lombok", *PhD Thesis*, Princeton University, 2005.
- Joseph and Harris, *Social Theory "Conflict, Cohesion and Consent"*, Edinburgh University Press Ltd, 2003.

Jurnal PNAS edisi September 2013: [www.pnas.org](http://www.pnas.org), yang berjudul, "Source of the Great A.D

Kaharuddin Sulkhad, *Merarik pada Masyarakat Sasak "Sejarah, Proses dan Pandangan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013

Kamus KBBI Offline.

Kingsley, J. J. (2010). Tuan Guru, Community and Conflict in Lombok, Indonesia. *PhD thesis*, Law, The University of Melbourne. Persistent Link: <http://hdl.handle.net/11343/35693>

L M. Ariadi, *Haji Sasak "Sebuah Potret Dialektika Haji dan Kebudayaan Lokal"*, Ciputat: Imprensa, 2013.

Lalu Bayu Winda, *Manusia Sasak "Bagaimana Mengganlinya"*, Yogyakarta: Genta Press, 2011.

Lalu Lukman, Lombok, Mataram: Pokja, 2004.

Lalu Lukman, *Tata Budaya: Adat Sasak di Lombok*, Kumpulan Tata Budaya Lombok, 2006

Lalu M. Azhar, Sejarah Daerah Lombok: *Arya Banjar Getas*, (Mataram: Yaspen Pariwisata Pejanggiq, 1997.

Leena Avonius, *Reforming Wetu Telu: Islam, Adat, and the Promises of Regionalism in Post-New Order Lombok* (2004);

MacDougall, *Kriminalitas dan Ekonomi Politik Keamanan di Lombok*, hlm. 375. Lihat juga, Kari Telle, *Vigilante Citizenship: Sovereign Practices and the Politics of Insult in Indonesia*, Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI), 2013

Marchiavelli, *the Prince*, terj. Luigi Ricci, Introduction. Chistian Gause, New York: New American Libery, 1980.

Max Weber, *Sosiologi, judul asli; From Max Weber; Essays in Sociology*" terj. Noorkholish, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Muhammad Sukri, Identitas Sasak "Pertaruhan & Pertarungan", Mataram: Leppim IAIN Mataram, 2011.

Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur "Analisis Wacana Kritis"*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

- Niccolo Machiavelli, *the Prince "Sang Penguasa"* terj. Natalia Trijaji, Surabaya: Selasar Surabaya, 2009.
- Nugroho Notosusanto, et al, *Sejarah Nasional Indonesia: "Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia"* Cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Pamarimatha, *Perdagangan dan politik di Nusa Tenggara*.
- Priyo Budisantoso, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru "Persepektif Cultural dan Structural"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Riberu, *Dasar-Dasar Kepemimpinan*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Rida'i, *Gus Dur: KH. Abdurrahman Wabid, Biografi Singkat 1940-2009*, Yogyakarta: Garasi House of Book, 2013.
- Ruth Krulfeld, 'Fatalism in Indonesia: Comparison of Socio-Religious Types on Lombok' (1966) 39 *Anthropological Quarterly*
- S Cederroth, *the Spel of the Ancestors and the Power of Mekkah. A sasak community on Lombok*, (Gothenburg: Studies in Social Anthropology, vol. 3. 1981
- Sarlito Wirawan Sarwon, *Psikologi Sosial Kelompok dan Terapan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Slamet Muljana, *Tafsir Sejarah Negarakertagama*, Yogyakarta: LKiS, 2006
- Sudirman, *Gumi Sasak dalam Sejarah, bagian 2*, Pringgabaya: KSU "Primaguna" dan Pusat Studi dan Kajian Budaya, 2012..
- Sudirman, *Gumi Sasak dalam Sejarah*, Pringgabaya: KSU Prima Guna, 2007.
- Sven Cederroth, *Return of the Birds. Images of a Remarkable Mosque in Lombok*, Report Information from ProQuest, 30 April 2015 10:52,
- Thomas W. Arnold , *Sejarah Dakwah Islam*, terj. Nawawi Rambe, Jakarta: Penerbit Wijaya, 1981.
- Weber, *On Charisma and Institution Building*,
- Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, Mataram: Yayasan Sumar Hamid, 1998.
- <http://news.detik.com/read/2013/10/01/123736/2374226/1513/ditemukan-sisa-letusan-gunung-rinjani-di-kedua-kutub-bumi>, 30-04-2015, 12:00.

<http://www.cpuik.com/2013/10/sejarah-kerajaan-gowa-tallo-makassar.html>

<http://sains.kompas.com/read/2013/10/02/2250336/Letusan.Samalas.dalam.Babad.Lombok.yang.Melumpuhkan.Dunia>, 30-04-2015, 13:00.